

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMP NEGERI 2 KISMANTORO
KABUPATEN WONOGIRI**



TESIS

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Pada
Program Studi Manajemen Pendidikan**

OLEH

TUKINO

NIM : Q100050127

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem Pendidikan Nasional dewasa ini, ternyata belum mampu sepenuhnya dalam menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dewasa ini terasa semakin cepat untuk mengimbangi dengan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat. Salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita dan juga faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap kecepatan ini adalah tuntutan pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan nasional. Pengaruh yang sangat menonjol adalah berasal dari penerapan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia telah digariskan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas: 2003: 7)

Kemajuan pendidikan banyak diwarnai oleh keberadaan guru, besarnya tanggung jawab guru merupakan tantangan bila dikaitkan dengan mutu pendidikan. Dalam kajian Tilaar (2002: 87) diungkapkan bahwa keluhan masyarakat terhadap mutu pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis

pendidikan adalah sebenarnya merupakan refleksi dari mutu guru yang rendah. Selanjutnya Tillaar (2004: 88) berpendapat bahwa guru profesional bukan hanya sekedar alat untuk transmisi kebudayaan tetapi mentransformasikan kebudayaan itu ke arah budaya yang dinamis yang menuntut ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang dapat bersaing, dan organisasi Sekolah, Kepala Sekolah faktor penentunya.

Seirama dengan perkembangan itu, agar tidak terjadi pembenturan dan pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan dalam implementasi dilapangan, kegagalan kegagalan disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengelolaan peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat terwujud. Menurut Danim (2003: 24) Kelemahan Pendidikan di Indonesia bukan pada disain, melainkan pada tingkat implementasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa, mutu proses pembelajaran lembaga pendidikan formal pada tingkat mikro perlu ditingkatkan.

Di bagian lain, Ramly (2005: 120) menyatakan bahwa, isu-isu kritis kelemahan pendidikan nasional tampak pada tiga indikator utama yaitu, (1) merosotnya mutu belajar siswa, (2) ketidak jelasnya relevansi pendidikan sekolah dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat, dan (3) rendahnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan persekolahan.

Bercermin pada kondisi tersebut di atas untuk mewujudkan tujuan pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999. Melalui undang-undang tersebut pemerintah meletakkan kewenangan sebagian besar pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau Kabupaten/ kota.

Untuk merealisasi undang-undang tersebut perlu dilakukan manajemen yang tepat dan pengembangan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hal tersebut sejalan dengan undang-undang Sisdiknas 2003 (Undang-undang sistem pendidikan nasional), yang menuntut penataan manajemen dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang sebelumnya merupakan wewenang pusat. Dengan berlakunya otonomi daerah ini, kewenangan bergeser pada sekolah dibawah koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah/kota. Namun demikian Sekolah sangat membutuhkan kemampuan Kepala Sekolah, guru yang profesional, menurut Mulyasa (2004:24) mengemukakan bahwa: Kepala Sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemampuan guru dan profesi guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan.

Menurut Kartikawati (1993: 5), profesi, merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang berkualitas tinggi, seorang pekerja profesional selalu akan mengadakan pelayanan atau pengabdian yang dilandasi oleh kemampuan profesional dan filsafat yang mantap. Juga pendapat Sugiarto (2003: 122) dinyatakan bahwa untuk memperoleh

kemampuan guru mengelola pembelajaran yang tinggi, harus didukung oleh motivasi kerja, etos kerja, pengalaman mengajar yang banyak, jenis dan lama penatran yang banyak dan tingkat pendidikan yang tinggi., maka demikian dalam organisasi sekolah, kedudukan kepala sekolah merupakan faktor penentu, penggerak segala sumber daya di sekolah agar segala komponen berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan, usaha peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar. Guru dikatakan bermutu apabila memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan memiliki wawasan yang cukup dan dapat menggunakan potensi yang ada secara maksimal dalam proses pembelajaran.

Umaedi, (2004): Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: [http://www. Geocities. Com/](http://www.Geocities.Com/) pengembangan sekolah. Secara operasional hal yang terkait pada kinerja profesional guru adalah: (a) melakukan perbaikan pembelajaran secara terus-menerus berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas atau catatan pengalaman kelas dan atau catatan perbaikan, (b) mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran di kelas maupun kegiatan praktikum. (c) guru perlu dirangsang untuk membangun sikap positif terhadap belajar, yang bermuara pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. (d) komunitas guru dengan penuh diskursus akademis dan profesional akan meningkatkan kinerja yang unggul.

Sumber daya manusia yang berpotensi dapat terbentuk melalui proses pendidikan. Hal ini disebabkan dengan memperoleh pendidikan, potensi setiap manusia akan dikembangkan dengan adanya transfer ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu.

jenjang pendidikan yang dapat mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik seseorang di bangku pendidikan adalah keikutsertaan seseorang dalam pendidikan di tingkat Sekolah menengah pertama.

Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menentukan prestasi dan produktivitas pengelola pendidikan. Seluruh aspek dalam kehidupan ini, terutama kesadaran tanggung jawab disiplin sikap dan moral sangat dipengaruhi oleh pendidikan, baik pendidikan formal informal maupun non formal. Pendidikan hendaknya mengacu pada perkembangan potensi-potensi individu secara optimal menuju norma-norma kedewasaan. Upaya pendidikan ini dimaksudkan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang produktif bagi diri sendiri dan lingkungannya, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas untuk mengisi pembangunan di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu dengan otonomi daerah tersebut strategi pembangunan pendidikan yang tidak efektif dimasa lalu ditinggalkan dan diubah dengan strategi pembangunan pendidikan yang efektif, strategi tersebut adalah pembangunan pendidikan yang memberdayakan yang memberikan kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan wawasan pengelolaan pendidikan di sekolah yang lebih baik.

Dengan strategi sekolah yang lebih dikenal ini adalah manajemen berbasis sekolah, (*school based management*) diharapkan akan melahirkan masyarakat belajar karena dengan strategi maka seluruh jajaran pengelola dan pelaksana pendidikan dituntut untuk terus belajar, dengan demikian siswa merasa senang karena kebutuhan bisa direspon oleh pengelola, guru sebagai pendidik di sekolah.

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas bangsa baik spiritual intelektual dan profesional di era reformasi. Siregar (1999: 1) menyatakan bahwa "Tujuan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Pemerintah Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan dasar yang utama dan kokoh untuk mencerdaskan seluruh warga negara Indonesia sehingga dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengisi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sejak era reformasi, mutu dan pemerataan merupakan masalah yang mendapat perhatian khusus. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta peningkatan mutu peserta didik. Dengan peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya di harapkan dapat meningkatkan pembelajaran yang ditandai dengan peningkatan prestasi belajar siswa sesuai dengan ketuntasan belajar baik secara individual maupun secara klasikal. Peserta didik atau siswa sebagai orang yang menjadi fokus dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan pribadinya sehingga mendapat bekal untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan demikian mutu guru sebagai tenaga profesional dan peningkatan mutu lulusan maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan sekaligus dapat memperlancar tercapainya tujuan Pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dikutip Fajar (2003: 5) menyatakan “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk meningkatkan mutu guru dapat dengan pelaksanaan aspek-aspek manajemen berbasis sekolah. Priyono (2000: 6) menyatakan "Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengambil keputusan yang partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah". Kemudian Umaedi (2001: 23) menyatakan bahwa "Aspek-aspek manajemen berbasis sekolah adalah: perencanaan dan evaluasi pengelolaan kurikulum pengelolaan pembelajaran pengelolaan ketenagaan pengelolaan sarana pengelolaan keuangan pelayanan siswa dan hubungan sekolah.

Melalui penerapan aspek-aspek manajemen berbasis sekolah kepala sekolah merupakan personil kependidikan yang memiliki peran besar dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sekolah. Akan tetapi pada posisi lain, guru memiliki peran yang besar dalam keberhasilan proses belajar mengajar di

kelas prestasikerja guru dan karyawan merupakan hal yang dapat dipakai sebagai tolok ukur, semangat kerja guru dan karyawan meningkat, dengan demikian kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sekolah, dalam pelaksanaan tidak semua kepala sekolah dalam mengelola sekolah belum berperan sesuai dengan fungsi sebenarnya, Selain itu dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pihak lain di luar siswa akan mengetahui kemampuan sekolah dalam mendidik mengajar dan melatih siswa menuju sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sampai dengan saat ini pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Akibat dari kurangnya manajemen Berbasis sekolah maka produktivitas kerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan belum dapat memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sebagai akibat akhir adalah dampak pada siswa yaitu prestasi belajar yang diperoleh belum sesuai dengan ketuntasan belajar, baik secara individual maupun klasikal. Oleh karena itu, setiap sekolah diharapkan dapat melaksanakan manajemen berbasis sekolah sehingga apa yang akan dicapai oleh sekolah dapat tercermin di dalam program sekolah

Berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan dimasa krisis. Akan tetapi karena pengelolaannya yang terlalu kaku dan sentralistik program itupun tidak banyak memberikan dampak positif, angka partisipasi pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun. Diduga hal tersebut erat kaitannya dengan masalah manajemen. Dalam kaitannya ini munculah salah satu pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan

kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas.

Mulyasa (2004: 11) Mengatakan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara mikro, meso, maupun makro. Kerangka makro erat kaitanya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek mesonya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah dalam pelaksanaan yaitu sekolah.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Maka manajemen berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan

pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah. Kemudian Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) dan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dan peningkatan mutu di sekolah. Peningkatan tersebut baik dalam bidang akademik maupun non akademik secara langsung maupun tidak langsung telah terjadi perubahan dan peningkatan pengelolaan pendidikan di sekolah. Khususnya peningkatan pada aspek kemandirian sekolah, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, dengan berbagai langkah yang telah ditempuh Direktorat PLP terkait dengan MPMBS ini telah berimbas pada berbagai daerah dan sekolah untuk menerapkan Manajemen berbasis sekolah sebagai model pengelolaan sekolah sesuai dengan tuntutan sekarang ini. Oleh karena itu, dipandang penting dan perlu untuk dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi mengenai pola pengelolaan sekolah.

Memperhatikan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis lebih menekankan untuk mengadakan penelitian dengan "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah SMP Negeri 2 Kismantaro Kabupaten Wonogiri". Hal –hal yang telah dilakukandan atau sedang diupayakan dalam pengelolaan pembelajaran, ketenagaan dan sarana prasarana sekolah.

B. Fokus Penelitian.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Kismantoro Kabupaten Wonogiri fokus tersebut dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut : Pengelolaan pembelajaran yang memperhatikan rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran evaluasi pembelajaran analisis evaluasi pembelajaran dan supervisi pembelajaran.

2. Pengelolaan ketenagaan dengan mengoptimalkan pembagian tugas pembinaan profesi, pengambilan keputusan, pembinaan kesiswaan pendidikan, latihan dan penataran-penataran yang sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Pengelolaan sarana dengan menerapkan perencanaan kebutuhan sarana pengadaan sarana pemanfaatan sarana pengamanan sarana dan pemeliharaan sarana yang telah dimiliki.
4. Pengelolaan keuangan sekolah dilakukan menurut sumber-sumber yang sah untuk memperlancar jalannya kegiatan operasional pengelolaan pendidikan di sekolah

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai di mana pengelolaan di SMP Negeri 2 Kismantoro Kabupaten Wonogiri khususnya tentang pengelolaan pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan sarana. Melalui usaha ini, maka SMP Negeri 2 Kismantoro Kabupaten Wonogiri dapat ikut serta mendukung upaya pemerintah meningkatkan

mutu pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis dan praktis dalam pengelolaan pendidikan antara lain :

1. Secara akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan pendidikan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 2 Kismantoro Kabupaten Wonogiri sehingga dapat menjadi bagian untuk memberikan sumbangan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam era otonomi sekolah yang sedang berjalan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :
 - a. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah
 - b. Sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat ikut serta meningkatkan mutu pendidikan.
 - c. Sebagai masukan bagi guru dalam mendukung upaya sekolah meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat menjadi bagian meningkatkan mutu pendidikan.
 - d. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam ikut serta secara partisipatif mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah.
 - e. Sebagai bahan masukan tenaga staf dalam ikut serta secara partisipatif dalam ikut serta mengimplementasikan manajemen sekolah

- f. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca yang peduli terhadap pendidikan untuk ikut serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam peningkatan mutu dan prestasi siswa dan dalam era otonomi daerah.

E. Definisi Istilah.

Ada beberapa istilah yang penting dalam penelitian ini ada yang perlu dijelaskan hal-hal ini dilakukan karena istilah-istilah tersebut dalam penelitian secara teknis memiliki arti khusus untuk menghindari terjadinya salah persepsi dan dan interpretasi maka dari itu istilah-istilah tersebut sangat perlu dijelaskan secara eksplisit adalah sebagai berikut.:

Pertama, pembelajaran dalam penelitian yang dimaksudkan adalah suatu pola umum tindakan Guru dan peserta didik dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran yang terjadi didalam kelas.

Kedua, SMP Negeri 2 Kismantoro Kabupaten Wonogiri yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Sekolah Pemerintah dibawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan pembelajaran pengelolaan ketenagaan, pengelolaan Sarana dan Prasarana masih mengacu pada kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu Depdiknas.

Ketiga, SMP Negeri 2 Kismantoro ini masih tergolong sekolah rintisan yang dimaksud dalam penelitian ini sehingga masih memerlukan pembinaan yang rutin terutama pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan daya serap prestasi Akademik maupun prestasi Non Akademik.

(Depdikbud 1994: 3)

F. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan penelitian ini disusun menjadi enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika laporan.

Bab dua landasan teori yang meliputi, Manajemen Berbasis Sekolah, definisi manajemen berbasis sekolah indikator Implementasi manajemen berbasis sekolah, penelitian terdahulu.

Bab tiga, Metode penelitian yang berisi pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran, lokasi, sumber data, impormen prosedur pengumpulan data, analisi pengumpulan data, pengecekan keabsahan data.

Bab empat, penyajian data berisi organisasi sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pembelajaran, kurikulum proses belajar mengajar, ekstrakurikuler, evaluasi penilaian, dan temuan penelitian.

Bab lima, pembahasan yang berisi pelaksanaan pembelajaran, Pengelolaan Ketenagaan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Bab enam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.